

ISSN : 1858 - 4977

JIA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

Volume 9

Nomor 2

Agustus 2013

J I A

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

ISSN : 1858 - 4977

VOLUME 9

NOMOR 2, Agustus 2013

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO**

JIA
JURNAL ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Volume 9, Nomor 2

Agustus 2013

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| Internationalisation Local Government in the Era of Bureaucracy Reform <i>Teddy Hikmat Fauzi</i> | 1- 6 |
| Peramalan Kunjungan Wisatawan Interasional dan Domestik ke Manado Tahun 2015 dan 2016 <i>Mauren. R. P. Kaloh</i> | 7 – 12 |
| Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan di Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan <i>Angle Binilang, Patar Rumapea</i> | 13 – 19 |
| Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Konsumen Berbelanja Pada PT Jumbo Swalayan Manado <i>Glady Ester Sendow, Riane Johnly Pio</i> | 21 – 30 |
| Pengaruh Implementasi Kebijakan Netralitas PNS Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado <i>Fikran Kasmayuda, Florence Daicy Jetty Lengkong</i> | 31 - 36 |

| | |
|--|---------|
| Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara <i>Anita Paliema, Patar Rumapea</i> | 37 – 41 |
| Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Percanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur <i>Alva Martoms Rorano, Masye S. Pangkey</i> | 43 – 50 |
| Evaluasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Daerah Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado <i>Theo B. W. Wuaten, J. M. Ruru</i> | 51 – 60 |
| Pengaruh Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Terhadap Efektivitas Organisasi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara <i>Yeni Paramitha Ginting, W.Y. Rompas</i> | 61 – 67 |
| Peranan Kepemimpinan Camat Dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud <i>Marta Firsa Maarebia, Florence .Daicy Jetty Lengkong</i> | 69 – 75 |
| Peranan Masyarakat Adat TOBARU Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat <i>Halger Tetoyo, Burhanuddin Kiyai</i> | 77 – 80 |
| Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan) <i>Fatri Badalia, J. Mandey</i> | 81 – 85 |

Pengaruh Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Terhadap Efektivitas Organisasi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Yeni Paramitha Ginting

W.Y. Rompas

Abstract: *This study is how bureaucracy reform policy implementation at the Regional Secretariat Bolaang North Mongindow, and whether there is influence of the bureaucratic reform policy implementation on organizational effectiveness. The method used in this study is a quantitative method. Sources of data / research respondents were as many as 37 employees were taken by random sampling technique from 73 employees of the Secretariat Regional North Bolaang Bolaang. Collecting data using questionnaires and assisted with interviewing techniques. The analysis technique used is the percentage analysis, linear regression analysis and product moment correlation. Results of data analysis showed: (1) variable regression coefficient bureaucratic reform policy implementation to increase organizational effectiveness is significant positive and (2) the correlation coefficient and the coefficient of determination bureaucratic reform policy implementation variables on organizational effectiveness is significant. Based on the results of that study concluded: (1) Implementation of bureaucratic reform policies in the Regional Secretariat Bolaang North Bolaang basically met the criteria efficient, effective, and rational as mandated by Government Regulation No. 41 of 2007. (2) The effectiveness of the organization in the Regional Secretariat Bolaang North Bolaang generally high enough / good, (3) the implementation of bureaucratic reform policies have a relationship and a positive and significant impact on the effectiveness of the organization in the Regional Secretariat Bolaang Bolaang.*

Keywords: *reform of the bureaucracy, organizational effectiveness.*

Berlakunya PP. No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah Kabupaten

Yeni Paramitha Ginting adalah Mahasiswa Program Studi Adm Publik FISIP Unsrat

W.Y. Rompas adalah Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Unsrat

Bolaang Mongondow Utara telah melakukan reformasi birokrasi pemerintah daerah antara lain adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penataan kembali organisasi daripada birokrasi pemerintah daerah merupakan bagian dari reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan reformasi birokrasi pemerintah daerah, maka organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi

organisasi yang efisien dan efektif serta solid dalam menjalankan perannya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi maksimal antara pemerintah dengan

institusi daerah lainnya, dan dengan masyarakat (Sedarmayanti, 2009). Dengan demikian semangatnya reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara selama ini dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*.

Gibson dkk (1996), konsep efektivitas dalam organisasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi. (1) Pandangan dari segi efektivitas individu menekankan pada hasil kerja anggota tertentu dari organisasi. Tugas yang harus dilaksanakan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Zauhar (1996) reformasi birokrasi adalah merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah: (1) struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional/kelembagaan); dan (2) sikap dan perilaku birokrat (aspek perilaku), guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat.

Menurut Hahn Been Lee (dalam Zauhar, 1996), bahwa tujuan reformasi birokrasi adalah : (a) penyempurnaan tatanan (keteraturan), (b) penyempurnaan metode, dan (c) penyempurnaan

unjuk kerja. Untuk mencapai penyempurnaan tatanan/keteraturan maka diperlukan tipe reformasi prosedur; dan untuk mencapai penyempurnaan metode maka diperlukan tipe reformasi teknik;

sedangkan untuk mencapai penyempurnaan unjuk kerja diperlukan reformasi program.

Kebijakan reformasi kelembagaan birokrasi pemerintah daerah yang ditetapkan dalam PP. Nomor 41 Tahun 2007 pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu PP.41 Tahun 2007 secara tegas dan rinci menetapkan ketentuan yang berkenaan dengan organisasi perangkat daerah, antara lain : kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah; besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah; susunan organisasi perangkat daerah; eselon perangkat daerah; pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. PP.41 Tahun 2007 juga menetapkan bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain : visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut menunjukkan bahwa di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi, sehingga diharapkan dapat menciptakan organisasi Sekretariat Daerah yang rasional, efisien dan efektif. Namun apakah kebijakan reformasi birokrasi tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ?, dan apakah implementasi kebijakan tersebut telah dapat meningkatkan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow ?; hal itu nampaknya masih merupakan suatu permasalahan yang perlu dijawab dan dikaji melalui suatu penelitian. Terdorong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka ditetapkan judul penelitian ini yaitu "Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Terhadap Efektivitas Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif oleh karena penelitian ini bermaksud mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Surakhmat, 1987), juga merupakan suatu penelitian yang didasarkan atas data angka-angka dan perhitungannya (Umar, 1997). Selanjutnya, Danim (2000) mengemukakan bahwa metode survey merupakan metode pengumpulan data yang bersifat deskriptif, asosiatif, dan logika sebab akibat, mengenai peristiwa atau fenomena melalui sejumlah unit atau individu.

Variabel adalah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variasi nilai itu akan tampak kalau variabel itu dibuat tingkatan-tingkatannya atau dibuat definisi operasionalnya (Malo, dalam Danim, 2000). Variabel-variabel dalam penelitian ini ialah Implementasi kebijakan reformasi birokrasi (sebagai variabel bebas), dan efektifitas organisasi (sebagai variabel terikat).

Populasi dalam penelitian ialah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jumlah PNS sebanyak 73 orang. Dari populasi tersebut ditetapkan sampel sebanyak 37 responden terdiri :dari Sekretaris Daerah 1 orang; Asisten

Sekretaris Daerah 3 orang;Kepala Bagian 8 orang; Kepala Sub Bagian 10 orang dan Staf/pelaksana 15 orang. Insrtumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: koesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif yaitu untuk mengetahui tentang status variabel implementasi kebijakan reformasi birokrasi, dan variabel efektivitas organisasi.. Analisis statistik inferensial atau statistik parametrik yang digunakan ialah analisis regresi linier sederhana dan korelasi sederhana. (Sudjana, 1990).

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Regresi Linier

Berdasarkan hasil pengolahan data (lihat lampiran analisis data), diperoleh nilai koefisien arah regresi (b) dan nilai konstanta (a) seperti pada persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$Y = 1,342 + 1,033 X$$

Persamaan regresi linier tersebut menunjukkan bahwa koefisien arah regresi = 1,033 bertanda positif. Hal ini mempunyai pengertian bahwa hubungan pengaruh variabel implementasi kebijaksanaan reformasi birokrasi (X) terhadap variabel efektivitas organisasi (Y) di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah positif yaitu sebesar 1,033 skala per unit; artinya implementasi kebijakan reformasi birokrasi (X) punya pengaruh positif terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Y) dengan rasio 1 : 1,033 atau 100 : 103,3. Uji keberartian regresi (uji-F) didapat nilai $F_{hitung} = 173,131$ pada probabilitas kesalahan 0,000. Ini bermakna bahwa

hubungan/pengaruh implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ialah positif dan sangat nyata signifikan atau sangat meyakinkan.

B. Analisis Korelasi

Hasil analisis data, didapat harga/nilai koefisien korelasi (r) = 0,912 dan koefisien determinasi (r^2) = 0,832. Uji signifikan didapat nilai $t = 13,185$ dengan probabilitas kesalahan/kekeliruan 0,000. Harga/nilai koefisien korelasi product moment sebesar $r = 0,912$ jelas mendekati angka maksimum koefisien korelasi (1,000); hal ini memberi petunjuk bahwa derajat korelasi antara implementasi kebijakan reformasi birokrasi dengan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah berada pada kategori tinggi/erat. Kemudian, harga/nilai koefisien determinasi sebesar $r^2 = 0,827$ atau 82,7% mengartikan bahwa bahwa perkembangan/peningkatan yang terjadi pada efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebesar 82,7% ditentukan oleh implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis regresi linier (regresi sederhana) dan analisis korelasi sederhana (korelasi product moment) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas telah dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan reformasi birokrasi punya hubungan fungsional/pengaruh dan daya determinasi yang signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hasil analisis regresi linier untuk

menguji pola hubungan fungsional/pengaruh dari variabel implementasi kebijakan reformasi birokrasi (X) terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didapat persamaan regresi linier yaitu : $\hat{Y} = 1,342 + 1,033 X$. Pada Persamaan regresi ini menunjukkan bahwa koefisien arah regresi bertanda positif yaitu $b = + 1,033$; hal ini mempunyai pengertian bahwa hubungan pengaruh variabel implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ialah positif dengan pola perkembangan sebesar 1 : 1,033, yang bermakna bahwa perkembangan/peningkatan implementasi kebijakan reformasi birokrasi sebesar 1 skala akan menyebabkan perubahan/peningkatan efektivitas organisasi sebesar 1,033 skala; dengan kata lain dapat diinterpretasikan bahwa implementasi kebijakan reformasi birokrasi punya pengaruh positif terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan pola perkembangan 100 : 103,3. Ini dapat diinterpretasikan peningkatan dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi sebesar 100% akan diikuti oleh peningkatan efektivitas organisasi sebesar 103,3%.

Pola hubungan pengaruh implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap efektivitas organisasi tersebut adalah sangat berarti/nyata atau sangat signifikan sebagaimana ditunjukkan dengan hasil pengujian keberartian regresi dengan uji-F didapat nilai $F_{hitung} = 173,131$ pada taraf signifikan 0,000. Hasil analisis regresi linier dan pengujian signifikan (Uji-F) tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan reformasi birokrasi mempunyai hubungan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dengan kata lain dapatlah dinyatakan implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan telah memberikan hasil dan dampak positif yang berarti atau signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pengujian selanjutnya dengan analisis korelasi sederhana (product moment) juga membuktikan adanya hubungan pengaruh positif dan signifikan dari implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,912 dan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,832 atau 83,2%. Nilai koefisien korelasi (r^2) sebesar 0,912 tersebut mendekati angka maksimum (1,000), sehingga dapat diinterpretasi bahwa korelasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah berada pada kategori tinggi atau sangat erat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,832 memberi petunjuk bahwa implementasi kebijakan reformasi birokrasi mempunyai daya penentu/pengaruh sebesar 83,2% terhadap perkembangan atau elastisitas efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Oleh karena koefisien korelasi atau determinasi tersebut bertanda positif maka dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebesar 83,2% ditentukan atau dipengaruhi adanya implementasi kebijakan reformasi birokrasi, sedangkan sisanya sebesar 16,8% ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Korelasi ataupun pengaruh implementasi kebijakan reformasi birokrasi

terhadap efektivitas organisasi tersebut adalah nyata atau signifikan pada taraf signifikan 0,01 atau taraf kepercayaan/keyakinan 99%, sebagaimana ditunjukkan dengan hasil pengujian signifikansi (uji-t) dimana didapat nilai $t_{hitung} = 13,185$ yang berada pada taraf signifikan 0,000.

Hasil analisis regresi linier dan analisis korelasi product moment berserta seluruh pengujian signifikansinya tersebut semuanya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reformasi birokrasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni "terdapat pengaruh implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara", dapat dinyatakan terbukti/teruji atau diterima kebenarannya secara meyakinkan atau sangat signifikan.

Untuk mengetahui atau memprediksi perkembangan / peningkatan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan perkembangan implementasi kebijakan reformasi birokrasi, maka dapat dilakukan pengujian ketepatan prediksi dengan metoda interpolasi. Dengan metode interpolasi yaitu memasukkan nilai score maksimum hasil pengamatan/tabulasi data variabel implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (yakni 50) ke dalam persamaan regresi linier hasil analisis data, maka peningkatan yang akan terjadi pada efektivitas organisasi didapat hasil perhitungan seperti di bawah ini:

$$\hat{Y} = 1,342 + 1,033 (50) = 52,99$$

Perhitungan ketepatan prediksi di atas memperlihatkan bahwa apabila implementasi kebijakan reformasi birokrasi dapat ditingkatkan kualitasnya dari kondisi yang ada sekarang sebesar nilai score maksimum hasil pengamatan variabel tersebut (50), maka diperkirakan akan terjadi peningkatan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 52,99 skala, atau jika dihitung dalam skala ideal pengukuran variabel implementasi kebijakan reformasi birokrasi (yakni = 60) akan meningkat atau naik sebesar 0,8832 atau 88,32%. Hasil pengujian prediksi ini mengisyaratkan bahwa akan terjadi peningkatan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara apabila implementasi kebijakan reformasi birokrasi di kantor tersebut dapat ditingkatkan atau dilakukan dengan lebih baik lagi. Karena itu apabila menghendaki adanya peningkatan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di masa depan, maka kebijakan reformasi birokrasi harus dilaksanakan dengan lebih baik lagi dengan tetap mengacu pada kriteria efisiensi, efektivitas dan rasionalitas sebagaimana amanat PP.41 Tahun 2007.

Dengan terujinya hipotesis penelitian berdasarkan analisis statistik di atas maka hal ini berarti bahwa penelitian ini dapat membuktikan kebenaran pendapat teoritis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap efektivitas organisasi. Sebagaimana dikemukakan dalam uraian kerangka teoritis pada Bab II bahwa kebijakan reformasi birokrasi akan dapat menciptakan atau mewujudkan organisasi birokrasi yang memenuhi ciri-ciri seperti : mempunyai strategi yang jelas, organisasi flat atau ditoleransi bersifat dasar, organisasi ramping atau tidak terlalu

banyak pembidangan secara horizontal, organisasi bersifat jejaring, organisasi bersifat fleksibel dan adaptif, organisasi banyak diisi jabatan fungsional, dan organisasi menerapkan strategi *learning organization* (Sedarmayanti, 2009). Para ahli teori dibidang manajemen organisasi umumnya juga umumnya menyatakan bahwa dengan penataan organisasi, akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif (Gibson dkk, 1998). Laevitt (dalam Stoner dan Wankel, 1996) juga mengatakan bahwa penataan struktur organisasi dengan melakukan desain kembali organisasi, desentralisasi, dan perubahan alur kerja dalam organisasi dapat meningkatkan prestasi kerja organisasi karena penataan kembali organisasi dapat menyebabkan peningkatan produktivitas dan semangat kerja serta kepuasan kerja yang tinggi.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa implementasi kebijakan reformasi birokrasi pemerintah daerah, khususnya penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan PERDA No. Tahun 2008 (telah dirubah dengan PERDA No.1 Tahun 2009) telah dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, telah dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah. Sebagaimana disebutkan dalam PP.41 Tahun 2007 bahwa dengan penataan kembali organisasi perangkat, maka diharapkan akan mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan di atas, maka

dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada dasarnya telah memenuhi kriteria efisien, efektif, dan rasional sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. (2) Efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara umumnya sudah cukup tinggi/baik; (3) implementasi kebijakan reformasi birokrasi punya hubungan dan pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, hasil penemuan dalam maka dapatlah dikemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut : (1) Efektivitas organisasi setiap satuan organisasi (bagian, sub-bagian) di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih perlu ditingkatkan. (2) Untuk lebih meningkatkan efektivitas organisasi maka reformasi birokrasi (penataan kembali organisasi) yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, harus diikuti dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia aparaturnya, dan juga penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas. (3) Sehubungan dengan implementasi kebijakan reformasi birokrasi memiliki hubungan dan pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap efektivitas organisasi

di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh sebab itu dapat dipertahankan untuk lebih ditingkatkan agar lebih dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S. 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Gibson L. James, dkk, 1989, *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*, Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Adaptif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Rafika Aditama, Bandung.
- Sudjana, 1990, *Metoda Statistika*, Alumni, Bandung.
- Umar, H. 1997, *Metodologi Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Zauhar Soesilo, 1996, *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dokumen :
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.